

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran untuk perbaikan di masa mendatang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Proses implementasi kebijakan refungsi Taman Ayodia menjadi RTH jika dilihat dari konsepsi Edward III dan Grindle berjalan kurang baik, karena dalam proses implementasinya, terdapat resistensi dari pedagang yang antara lain disebabkan oleh kurangnya komunikasi dari Pemda dan tempat relokasi yang tidak layak.
- 2 Dimensi yang paling dominan dalam implementasi kebijakan refungsi RTH di Taman Ayodia adalah *interests affected*. Kepentingan kelompok sasaran tidak terakomodasi dengan baik, sehingga menyebabkan adanya penolakan dari para pedagang. Hal ini juga ditambah dengan *type of benefits* bagi kelompok sasaran yang tidak ada dalam implementasi kebijakan. Hal ini akhirnya mengganggu proses implementasi secara keseluruhan. Selain itu, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan isi dari

kebijakan tidak tersampaikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya dialog yang terjadi antar pedagang dan Pemda.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang perlu ditindak lanjuti adalah:

- 1 Dalam implementasi kebijakan ini, Pemda harus lebih dapat mengkomunikasikan isi dan tujuan kebijakan secara baik. Kepentingan-kepentingan pribadi yang berasal dari instansi-instansi terkait seperti pungli harus dapat dihilangkan, karena adalah kewajiban Pemda untuk melayani masyarakat. Selain itu, tempat relokasi para pedagang seharusnya dapat lebih dikaji kembali agar para pedagang tidak sepenuhnya merasa dirugikan oleh kebijakan refungsi ini.
- 2 Kepentingan kelompok sasaran adalah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemda, selama ini rakyat kecil yang lebih sering disisihkan dalam suatu kebijakan. Peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan juga penting, oleh karena itu di masa yang akan datang Pemda diharapkan dapat lebih membuka akses bagi peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kebijakan yang terkait dengan RTH, salah satunya dengan mengadakan dialog. Komunikasi internal juga harus ditingkatkan agar koordinasi antar dinas terkait dapat berjalan dengan baik.